

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perancis adalah salah satu negara Eropa yang memperkuat kekuasaannya di negara Afrika khususnya di Afrika bagian Barat. Ada 30 negara di Afrika Barat yang menjadi koloni dari Perancis dan hal ini bisa dikatakan kalau Perancis hampir menjajah seluruh wilayah di Afrika Barat. Salah satu negara jajahan Perancis adalah Mali. Mali adalah negara yang dijajah Perancis sejak abad ke 19 yaitu pada tahun 1906 dan mendapat kemerdekaan dari negara jajahannya, yaitu Perancis pada 22 September 1960. Mali merupakan negara *landlocked* yang terletak di Afrika Barat. Negara ini tergantung pada sektor pertanian dan pertambangan emas sebagai sumber pendapatan. Berdasarkan *Human Development Index* (HDI) UNDP, Mali merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang menempati urutan 182 dari 187 negara. walaupun demikian, Mali merupakan negara ketiga penghasil emas di Afrika Barat. Bukan hanya itu saja, Mali juga menyimpan kekayaan Sumber Daya Alam yang melimpah. Hal inilah yang membuat Perancis ingin menguasai Mali.

Meskipun Mali beridentitas sebagai bekas koloni Perancis dan Perancis adalah kolonial Mali, hal tersebut tidak membuat kedua negara merenggangkan hubungan setelah Mali merdeka. Hubungan Perancis dan

Mali justru semakin mesra dan menjalin kerjasama di berbagai sektor. Bahkan Mali menempatkan Perancis sebagai negara induknya. Dan Perancis pun selalu memberikan bantuan yang dibutuhkan Mali.

Namun, keharmonisan hubungan Mali dan Perancis tidak berjalan dengan mulus. Banyak isu yang bermunculan dan berdampak menimbulkan kerenggangan hubungan antara Perancis dan Mali. Mulai dari konflik internal Mali hingga isu terorisme pun mewarnai hubungan Perancis dan Mali. Isu – isu yang terjadi di Mali secara tidak langsung menimbulkan kekhawatiran di negara Perancis sebagai negara induk Mali. Dalam pidato Presiden Francois Hollande terhadap situasi di Mali dinyatakan bahwa, apa yang sedang terjadi di Mali akan mengancam keamanan di Afrika Barat dan Eropa, Perancis secara khususnya.

Hal tersebut akhirnya yang membuka pintu adanya intervensi militer yang dilakukan Perancis di Mali pada awal tahun 2013. Intervensi militer Perancis ke Mali dimulai dengan pengiriman tentara militer ke negara tersebut beserta angkatan udaranya. Kemudian dilanjutkan dengan Pernyataan operasi militer Perancis atas permintaan Presiden Mali Dioncounda Traore. Presiden Perancis, Francois Hollande juga menyatakan pendapatnya, ”Angkatan bersenjata Perancis membantu pasukan Mali sore ini untuk bertempur melawan unsur-unsur teroris,”

Intervensi militer yang dilakukan Perancis pada awalnya adalah untuk mengatasi konflik yang terjadi di Mali dan menjaga keamanan

negerinya dan Afrika Barat. Namun, seiring berjalannya waktu Intervensi yang dilakukan Perancis tidak hanya sebatas pada hal itu saja. Namun ada hal lain intervensi militer itu dilakukan Perancis di Mali.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu : “ Mengapa Perancis melakukan intervensi militer di Mali pada tahun 2013? ”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui faktor – faktor Perancis melakukan intervensi militer di Mali.

D. Landasan Teori

A. Politik Luar Negeri

Politik Luar Negeri pada dasarnya merupakan “action theory”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu.¹ Secara umum Politik Luar Negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri maupun luar

¹ Perwita,Banyu Anak Agung dan Yanyan Mohammad.2005.*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*.Bandung: P.T Remaja Rosdakarya. Hlm 47

negeri serta sekaligus menentukan ketrlibatan suatu negara di dalam isu – isu internasional atas lingkungan sekitarnya.

Politik Luar Negeri merupakan salah satu bidang kajian studi dalam Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek – aspek eksternal, tetapi juga aspek – aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor – aktor non-negara semakin penting peranannya dalam hubungan internasional.²

Dalam kajian Politik Luar Negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.³

Politik Luar Negeri nantinya akan menghasilkan suatu kebijakan luar negeri. Yang mana kebijakan luar negeri itu dijalankan oleh pemerintah suatu negara yang memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun

² Ibid, Hlm.48

³ James N. Rossenau,1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*.New York : The Free Press, hal. 171, 173

kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara – negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara. lebih lanjut menurut Rosenau, apabila kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal need) termasuk di dalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut, nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, intitusi, dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara – bangsa.

Dalam melaksanakan politik luar negeri sering disinggung pengertian – pengertian mengenai pandangan hidup bangsa, kepentingan nasional, sasaran, kebijaksanaan, kewajiban dan prinsip.

Kepentingan nasional ialah tujuan umum yang dari semula sampai tingkat terakhir diperjuangkan oleh suatu bangsa.⁴

Politik Luar Negeri tentunya memiliki sebuah tujuan. Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara – negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain.

K.J Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan – tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu :

1. Nilai (values) yang menjadi tujuan dari pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

Konsep lain yang melekat pada tujuan politik luar negeri adalah kepentingan nasional (national interest) yang didefinisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori / keinginan suatu negara yang berdaulat. Kepentingan Nasional terbagi dalam beberapa jenis :

⁴ Jusuf,Suffri.*Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*.Pustaka Sinar Harapan.Jakarta.1989.hal 114

1. Core/ basic/ vital interest; kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya.
2. Secondary interest; meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing – masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan misalnya.

B. Faktor Pendorong Politik Luar Negeri

1. Faktor Pendorong Menurut K.J Holsti

Dalam mencapai Politik Luar negeri diperlukan kebijakan luar negeri, menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut. Sehingga pendapat Holsti dapat diperjelas dengan pengkalsifikasian bahwa politik luar negeri dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni :

1. Faktor Eksternal

Faktor – faktor non domestik suatu negara yang memengaruhi negara dalam melakukan politik luar negeri atau mengeluarkan kebijakan luar negeri. Struktur sistem internasional, kebijakan dari negara lain, masalah global dan

regional sektor privat, hukum internasional dan opini publik global merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Adapun faktor eksternal tersebut meliputi :

- a. Struktur sistem internasional, yaitu tatanan internasional, unipolar, bipolar, atau multipolar. Situasi ini berpengaruh pada pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, terlebih bagi negara – negara yang berada pada pengaruh negara besar atau negara pusat polar.
- b. Karakteristik atau struktur ekonomi internasional, faktor ini terdiri dari tiga hal yaitu struktur ekonomi global, masih dalam keadaan polaritas atau sudah mengalami globalisasi. Selanjutnya peran rezim ekonomi internasional dan keadaan ekonomi global saat itu.
- c. Kebijakan aktor atau negara lain, faktor ini adalah bentuk tanggapan atau respon dari negara lain di luar negara atau aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan luar negeri.
- d. Masalah global dan regional sektor privat, merupakan masalah yang dilakukan oleh aktor non-negara atau aktor privat. Masalah yang dimaksud adalah masalah kontemporer dalam hubungan internasional.

- e. Hukum internasional dan opini publik, kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh hukum internasional yang berlaku pada negara tersebut juga opini publik global terkait kebijakan yang akan dikeluarkan.

2. Faktor Internal

Faktor domestik yang mempengaruhi negara dalam menyusun politik luar negeri. Kebutuhan sosioekonomi atau kebutuhan keamanan, karakteristik geografi dan topografi, opini publik domestik, struktur pemerintah dan filosofi, birokrasi, dan pertimbangan etik merupakan faktor internal atau domestik yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Adapun faktor internal tersebut meliputi :

- a. Kebutuhan sosioekonomi atau keamanan adalah faktor yang memengaruhi keadaan sosio ekonomi atau keamanan domestik negara.
- b. Karakteristik geografi dan topografi, kondisi geografi dan topografi sangat memengaruhi keadaan sosial domestik.
- c. Atribut nasional adalah karakteristik atau ciri umum suatu negara, keikutsertaan suatu negara terhadap suatu forum atau organisasi. Karakteristik umum ini akan memengaruhi bentuk kebijakan luar negeri suatu negara.

- d. Struktur pemerintahan dan filosofi, struktur pemerintahan dan falsafah yang dianut oleh sebuah negara secara langsung akan memengaruhi cara pengambilan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan.
- e. Opini publik, yang dimaksud adalah pendapat masyarakat yang memiliki kebebasan dalam berpendapat. Holsti menjelaskan untuk mengetahui sejauh mana pendapat masyarakat berpengaruh harus dilihat dari siapa yang berpendapat, pada isu apa, dan bagaimana pendapatnya.
- f. Birokrasi, hal ini tertuju bagaimana proses perumusan kebijakan luar negeri dirumuskan dan bagaimana kerjasama antar elemen dalam pemerintahan dalam merumuskan kebijakan.
- g. Pertimbangan etik adalah pertimbangan yang dilakukan oleh negara agar tujuan kepentingan nasional dari kebijakan luar negeri yang dikeluarkan tercapai.

2. Faktor Pendorong Menurut Howard Lentner

Diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu :

1. Determinan Luar Negeri

Mengacu pada keadaan,

a. Sistem Internasional

Pola interaksi di antara negara – negara yang terbentuk/ dibentuk oleh struktur interaksi diantara pelaku – pelaku yang paling kuat (most powerful actors).

b. Situasi Pada Suatu Waktu Tertentu

Pola – pola interaksi yang tidak tercakup/ mencakup keseluruhan sistem internasional.

Secara ringkas dapat dikatakan situasi sebagai suatu alat analisis (analytical tool) dapat memberikan alat untuk menentukan lingkungan internasional (eksternal) yang relevan bagi para pembuat keputusan (decision-makers). Selain itu, konsep ini juga berfungsi sebagai alat untuk mrnghubungkan dua unit analisis yang lainnya yaitu negara dan sistem internasional. Manfaat penggambaran kondidi lingkungan internasional ini, yaitu dapat memberikan setting (latar belakang) munculnya peristiwa – peristiwa dalam politik luar negeri, serta dapat membantu memunculkan faktor – faktor yang menghambat dan mendukung (constraining and facilitating factors) dalam interaksi antar negara.

2. Determinan Domestik.

Menunjuk pada keadaan di dalam negeri yang terbagi ke dalam tiga kategori berdasarkan waktu untuk berubah, yaitu :

1. Highly stable determinants; terdiri atas luas geografi, lokasi, bentuk daratan, iklim, populasi, serta sumber dayaa alam.
2. Moderately stable; terdiri atas budaya politik, gaya politik, kepemimpinan politik, dan proses politik.
3. Unstable determinants; yaitu sikap dan persepsi jangka panjang serta faktor – faktor ketidaksengajaan.

3. Faktor Pendorong Menurut James N. Rosenau

1. Faktor eksternal,
 - a. Faktor sistemik, menjelaskan struktur hubungan antar negara – negara besar, pola – pola aliansi yang terbentuk antar negara – negara.
2. Faktor Internal,
 - a. Masyarakat, mencakup faktor kebudayaan, dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik terhadap dunia luar.
 - b. Pemerintahan, yang menjelaskan tentang pertanggungjaawaban politik dan struktur dalam pemerintahan.

- c. Idiosinkratik, persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai.

C. Intervensi Militer

Intervensi mengacu pada tindakan aktor eksternal yang memengaruhi keadaan domestik suatu negara berdaulat.⁵ Intervensi merupakan bentuk hard diplomacy untuk menyelesaikan konflik, terutama bagi negara yang dinilai tidak memiliki kapabilitas untuk menghentikan konflik.

Intervensi sebagai instrumen resolusi konflik yang memiliki beberapa prinsip, yaitu :

1. Impartiality

Sikap dari interverner yang tidak melibatkan kepentingannya dalam tindakan intervensi, prinsip ini juga dapat diartikan bahwa interverner harus bersikap netral.

2. Mutuality

Prinsip mendasar dalam tindakan intervensi, antara interverner dan negara harus saling membantu dalam upaya penghentian konflik.

3. Sustainability

⁵ Joseph Nye, *Understanding International Conflict*. New York:Longman,1997).h. 134

Diartikan bahwa tindakan intervensi memberikan dampak berkelanjutan serta menuju pada penghentian kekerasan dan rekonstruksi pascakonflik.

4. Complementarity

Prinsip ini bertujuan saat intervensi dilakukan oleh pasukan multinasional untuk saling membantu demi kepentingan yang lebih besar.

5. Reflexivity

Prinsip yang membuat intervensi mengingat tujuan intervensi dan batasan – batasan yang dimiliki.

6. Consistency

Prinsip yang menegaskan sikap konsisten dalam tindakan intervensi agar tidak terjadi standar ganda.

7. Accountability

Prinsip ini mengatur hubungan antara intervensi dan atas nama siapa mereka bertindak, sehingga jelas atas otoritas siapa intervensi dilakukan.

8. Universality

Mengingatkan bahwa intervensi merupakan tindakan lintas batas negara dan berdampak secara universal.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah (Coghlan & Brannick 2010; Collis & Hussey 2003; Leedy & Omrod 2005).⁶ Setiap Metode Penelitian disusun berdasarkan dan dipengaruhi oleh asumsi filosofis penelitian yang dianut oleh sang poeneliti. Metode Penelitian yang berbeda mensyaratkan penguasaan kemampuan dan alat yang berbeda. Metode Penelitian menentukan bagaimana data penelitian dikumpulkan.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata – kata dan bukan rangkaian angka. Sedangkan penelitian deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Penelitian Deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah – milah atau mencari faktor – faktor atau variabel tertentu.

Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek – praktek yang berlaku.

⁶ Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar – Dasar*. 2012. Jakarta : PT Indeks, h. 36

3. Membuat perbandingan atau evaluasi.⁷

Metode deskriptif pada hakekatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori.⁸

2. Jenis Data dan Sumbernya

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung dari aktor – aktor terkait misalnya aktor negara. Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari berbagai literatur.

3. Teknik Pengumpula Data

Pemilihan Metode Penelitian akan menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan. Secara umum, dalam penelitian kualitatif alat pengumpulan data yang paling sering digunakan adalah wawancara, pengamatan lapangan, dan telaah dokumen atau studi dokumen.

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah dokumen atau studi dokumen. Menurut Esterbeg, dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala

⁷ M. Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 22.

⁸ *ibid* h. 22.

catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (hardcopy) maupun elektronik (softcopy). Dokumen dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto, undang – undang, notulen, blog, halaman web, foto dan lainnya.

Dokumen dapat berguna jika peneliti yang ingin mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa tetapi mengalami kesulitan untuk mewawancarai langsung para pelaku. Terdapat berbagai macam jenis dokumen yang mungkin dijumpai peneliti. Adapun Tipe – tipe dokumen menurut Myers antara lain :

1. Berdasarkan sumbernya dokumen dapat diklasifikasikan sebagai dokumen yang bersifat personal, privat, atau publik.
2. Dokumen tertulis dan catatan (*records*).
3. Dokumen Historis atau Catatan Sejarah. Menurut

Ada beberapa tipe dokumen historis, (Gootschalk : 2006)⁹

antara lain *Contemporary records*, contoh catatan pengadilan

- a) *Confidential reports*, contoh laporan diplomatik, laporan militer
- b) Laporan publik seperti artikel surat kabar
- c) Kuesioner
- d) Dokumen negara termasuk di dalamnya undang – undang
- e) Opini yang dipublikasikan lewat media massa
- f) Fiksi, puisi, lagu, cerita rakyat, dll.

⁹ ibid

4. Foto, video, dan film dari suatu peristiwa
5. Dokumen elektronik
6. Dokumen di internet merujuk ke dokumen elektronik yang tersedia secara bebas di internet. Penggunaan dokumen di internet harus sangat berhati – hati dan teliti dalam melakukan verifikasi dan validasi informasi.

Untuk menggunakan dokumen peneliti dapat melakukan beberapa hal berikut. Pertama peneliti sebaiknya melakukan penilaian terhadap kualitas dokumen yang dikumpulkan. Payne & Payne dan Scott memberikan penilaian terkait kualitas dokumen dengan melihat dari 4 komponen berikut :

1. *Otentik*, yaitu keaslian dan asal dokumen tersebut tidak diragukan.
2. *Kredibel*, yaitu dokumen yang digunakan bebas dari kesalahan dan penulisnya dapat dipercaya.
3. *Representatif*, yaitu apakah dokumen yang digunakan adalah dokumen yang biasa dijumpai atau langka.
4. *Makna*, yaitu apakah dokumen yang didapat jelas dan dapat dipahami.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian kualitatif cenderung menghasilkan jumlah data yang sangat banyak. Jumlah data yang banyak tersebut jelas membutuhkan perencanaan dan strategi yang tepat untuk mengolah dan menganalisis.

Ada beberapa macam teknik analisa data yang bisa peneliti gunakan. Tidak jarang peneliti kualitatif menggunakan teknik yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif (misal statistik deskriptif, analisis regresi, dan lain – lainnya) untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai data yang dimiliki. Pengumpulan data dan analisa data sering terjadi secara simultan. Peneliti mulai menganalisa data begitu ada data yang masuk.

Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif Model Miles dan Huberman yang menjelaskan ada tiga macam kegiatan dalam analisa data kualitatif, yaitu :

- a. *Reduksi Data*, merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang di dapatkan.
- b. *Model Data (Data Display)*, Berisi Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berbentuk teks naratif, sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- c. *Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data*. Proses ini dijelaskan bagaimana mulai mencari makna terkait faktor pendorong intervensi militer Perancis di Mali

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian secara sistematis dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulisan skripsi dengan judul “*Faktor Pendorong Intervensi Militer Perancis di Mali Tahun 2013*” ini dibagi menjadi empat bab dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan gambaran umum intervensi militer Perancis di Mali tahun 2013 yang memuat Gambaran Umum Negara Mali dan Pengaruh Perancis, Gambaran Umum Hubungan Perancis – Mali, dan Gambaran Umum Awal Intervensi Militer Perancis di Mali.

BAB III merupakan faktor pendorong intervensi militer Perancis di Mali tahun 2013 yang memuat keterlibatan perancis terhadap konflik yang terjadi di Mali, penjelasan faktor internal dan eksternal Perancis melakukan intervensi di Mali tahun 2013 melalui analisis penggunaan teori faktor politik luar negeri K.J Holsti.

BAB IV adalah bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran.